



# **KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NASIONAL: Solusi Guna Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi**

Denpasar, 25 Agustus 2016

Disajikan oleh:  
Ir. Adijanto, MPA  
Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan  
DITJEN PERBENDAHARAN, KEMENKEU RI

# DASAR HUKUM

## UU 20 Tahun 1997

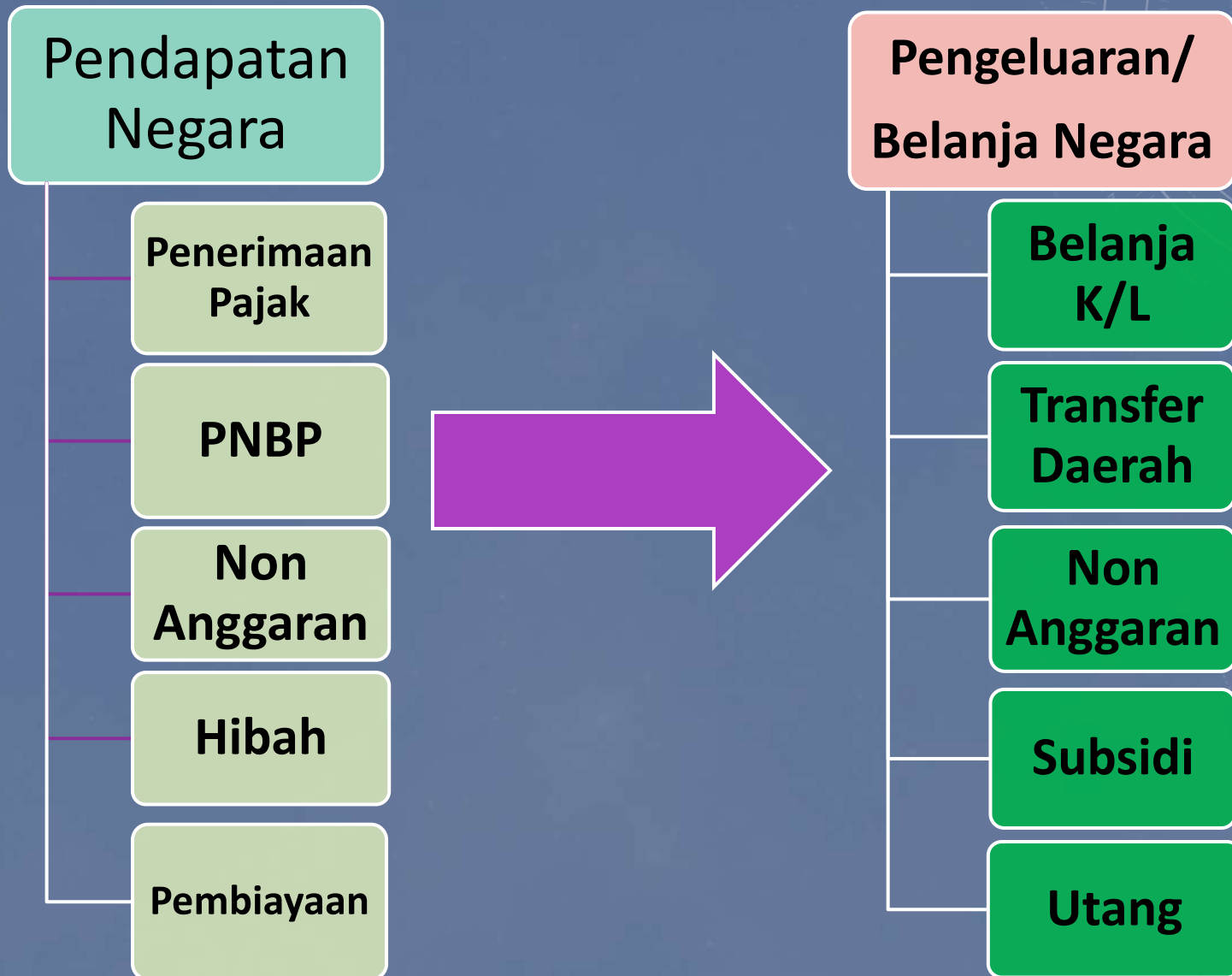
### Bab I. Pasal 1

- ayat (1). Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak.
- (2). Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas permukaan dan didalam bumi yang dikuasai oleh Negara.
- (6). Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (7). Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### Pasal III.

- ayat (4). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara
- (5). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

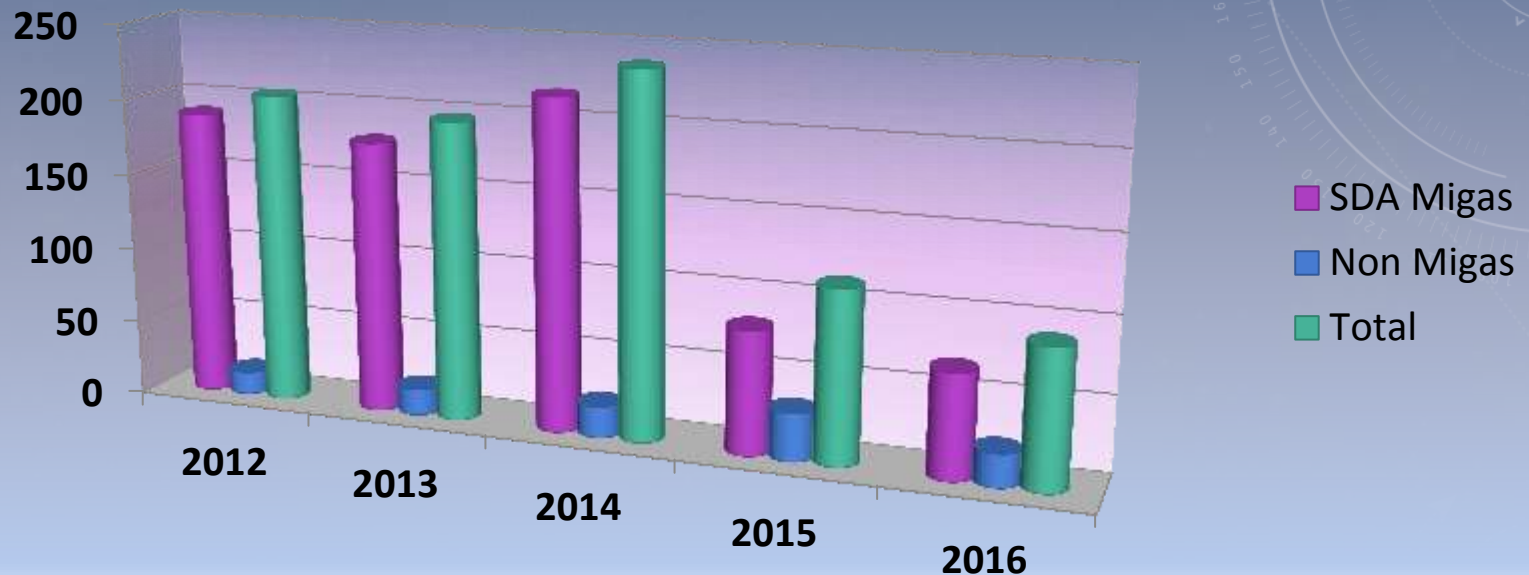
# KEUANGAN NEGARA



# KEMENKEU – DITJEN PERBENDAHARAAN

- **SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK**
- **UNTUK MENJAMINI AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA**

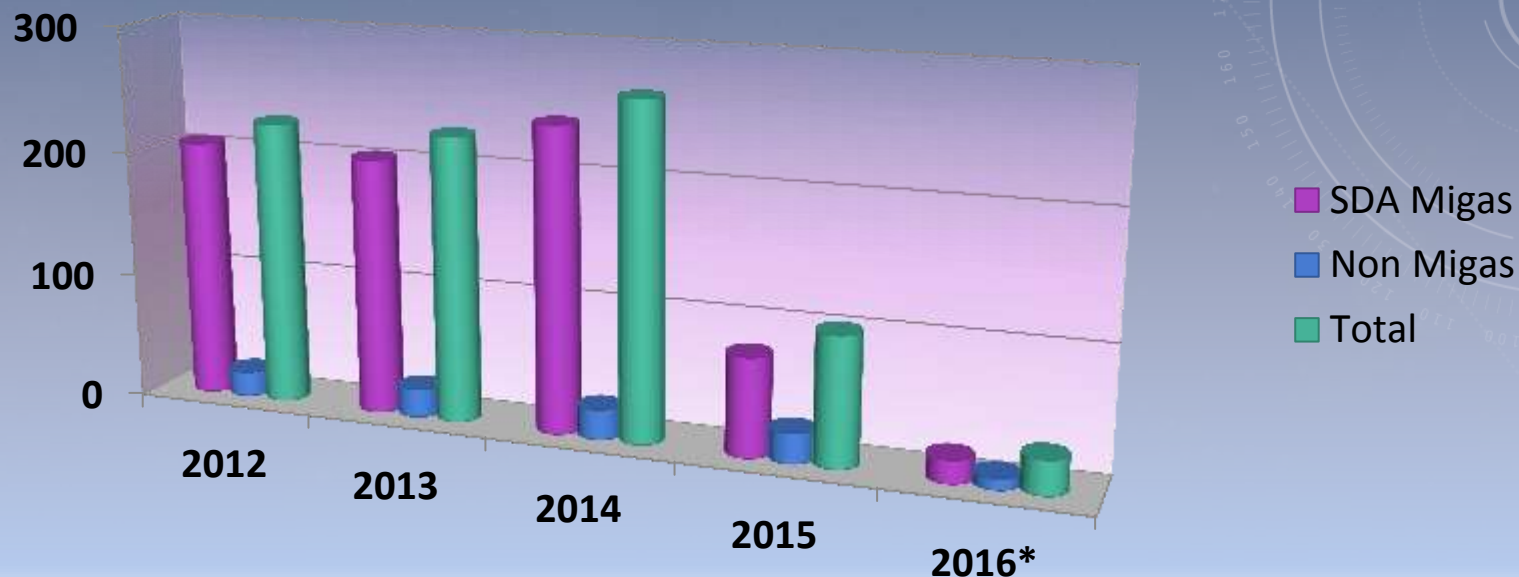
## Grafik Perbandingan Proyeksi Penerimaan PNB Periode tahun 2012-2016\* (dalam trilyun rupiah)



| Tahun                                | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| A. SDA Migas                         | 189,6 | 179,2 | 216,9 | 81,4  | 68,7 |
| B. Non Migas (Pertamb. Umum/Minerba) | 15,2  | 17,6  | 20,9  | 37,6  | 21,8 |
| Total (SDA+Pertamb. Umum)            | 204,8 | 196,8 | 237,8 | 113.1 | 90,5 |

• Sumber: Kemenkeu RI (diolah)

## Grafik Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Periode tahun 2012-2016 (dalam trilyun rupiah)

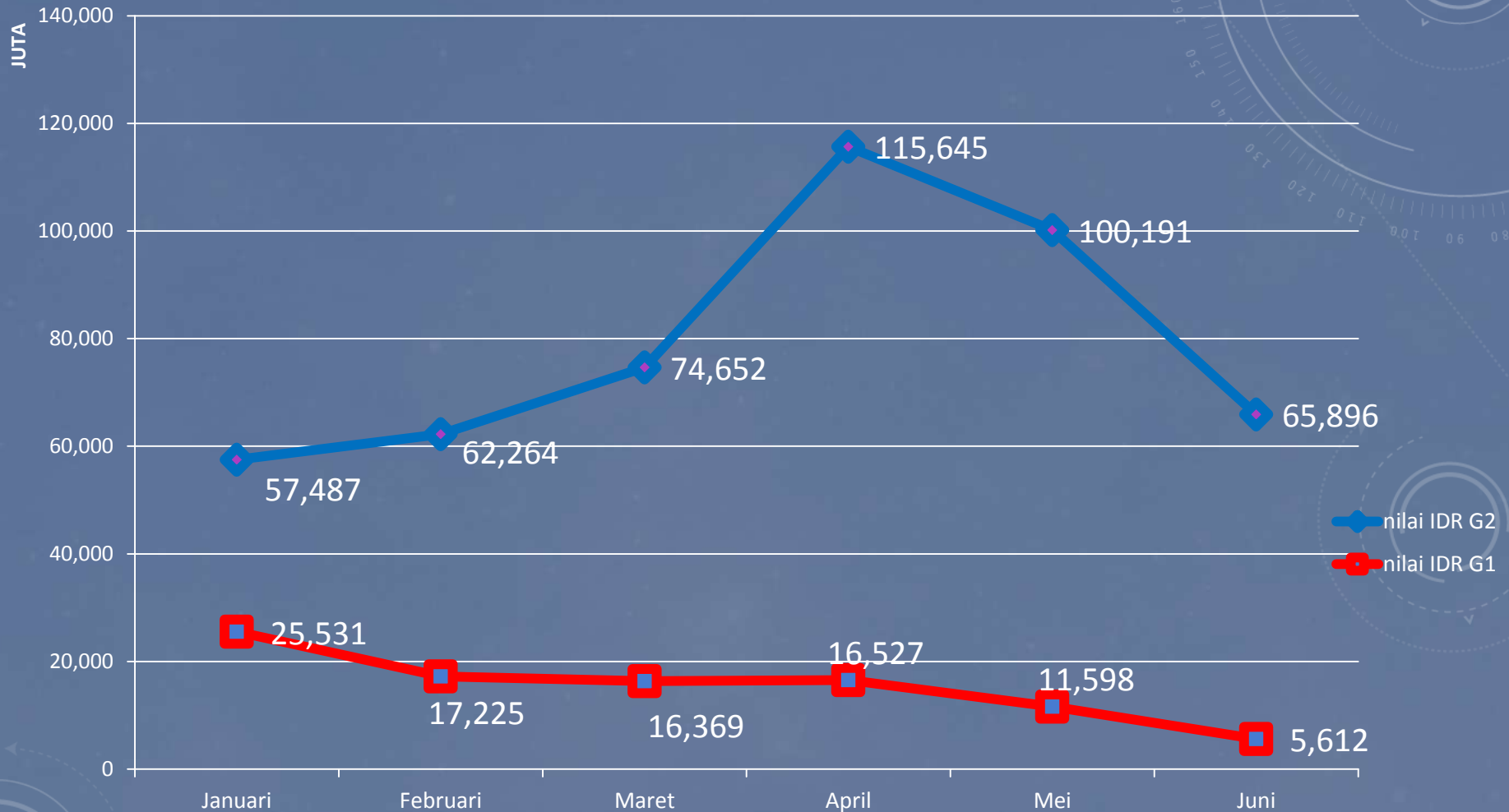


| Tahun                                | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016* |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. SDA Migas                         | 205,8 | 203,6 | 240,8 | 78,4  | 18,5  |
| B. Non Migas (Pertamb. Umum/Minerba) | 20,0  | 22,7  | 23,9  | 24,0  | 8,9   |
| Total (SDA+Pertamb. Umum)            | 225,8 | 226,4 | 264,7 | 102,4 | 27,4  |

\*) per 30 Juni 2016

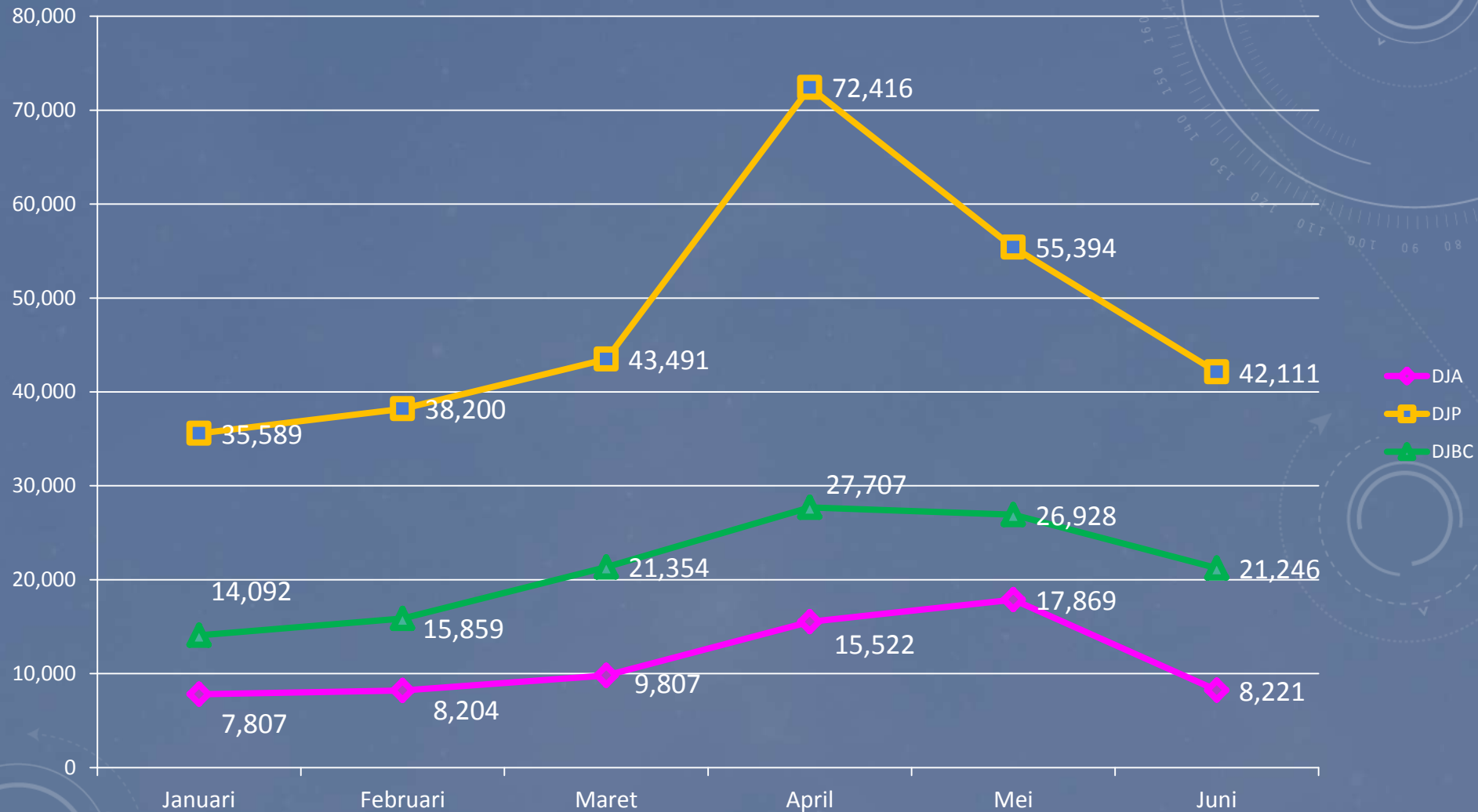
Sumber: LKPP(audited), Kemenkeu RI

# PERBANDINGAN NILAI G1-G2



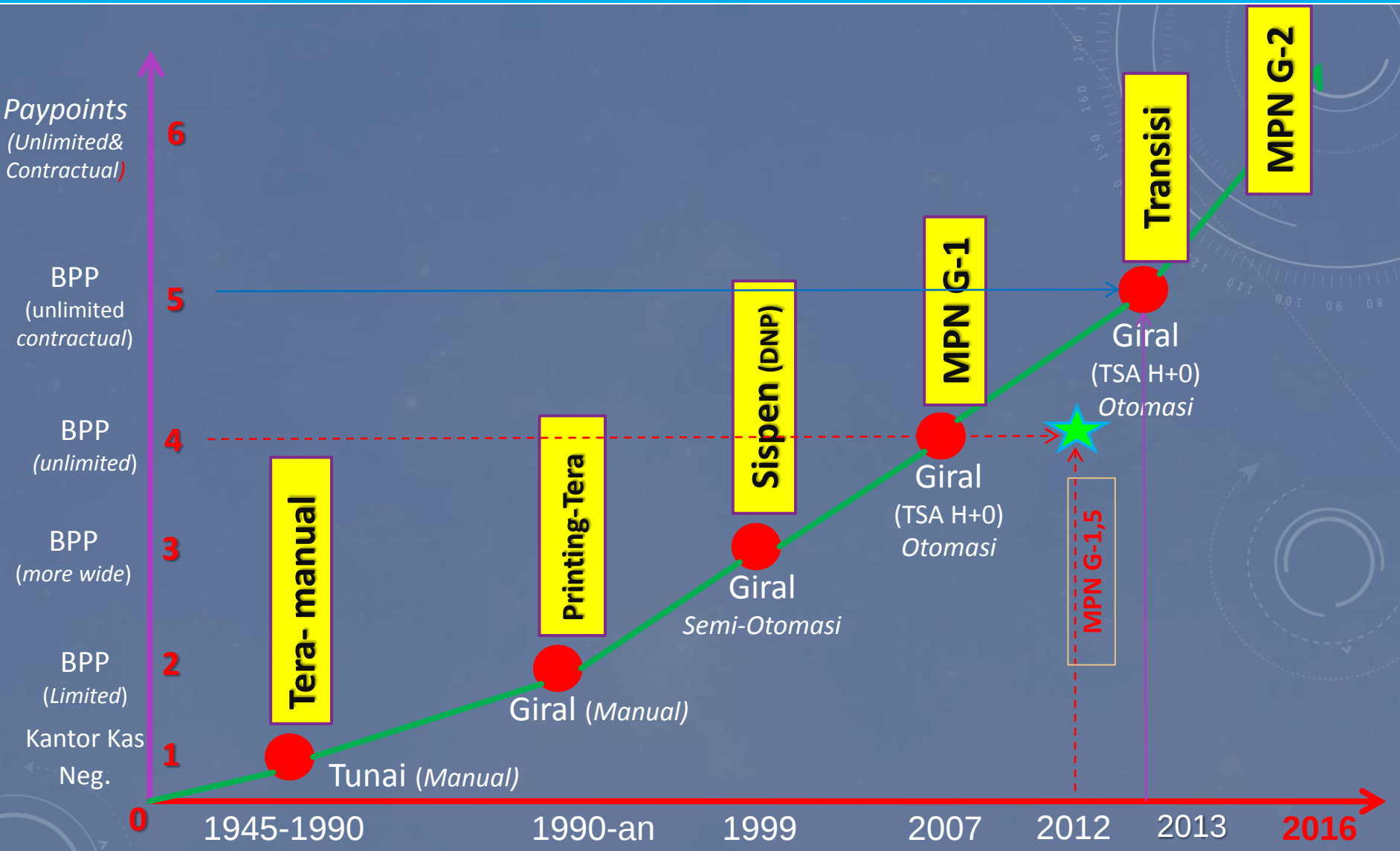
Sumber: intranet perbendaharaan dan dashboard mpn

# PERBANDINGAN NILAI MPN G-2 PER BILLER



Sumber: dashboard mpn

# TIMELINE - LAYANAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA



# KELEMAHAN PEMBAYARAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK DALAM SISTEM LAMA

1. Wajib bayar/wajib setor kadang mengalami kesulitan dalam mendapatkan formulir ssbp/ssp
2. Wajib bayar/wajib setor mengalami kesulitan dalam mengisi kode-kode pada ssbp/ssp
3. Hal tersebut mengakibatkan kurang akuratnya informasi penyetoran
4. Petugas teler bank/pos persepsi memerlukan waktu yang lebih lama dalam melayani penyetoran
5. Dikarenakan peng-*input*-an kode-kode di ssbp/ssp ke dalam sistem mpn masih dilakukan secara manual maka kadang terjadi salah *input* dalam proses tersebut
6. Hal-hal tersebut mengakibatkan kurang cepatnya pelayanan dan kurang akuntabelnya penerimaan negara.

# CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK DENGAN SISTEM MPN G2



# ARAH PENYEMPURNAAN SISTEM MPN

Dari Kondisi

Menjadi

Manfaat

Manual

Electronic Billing System

Akuntabilitas, Fleksibilitas,  
dan Kecepatan

Layanan Melalui Counter

Layanan On-line, Fleksibel

TIDAK Tergantung Waktu  
dan Tempat

Tidak Melayani Seluruh  
Transaksi Penerimaan  
Negara

Melayani Seluruh Transaksi  
Penerimaan Negara

Akuntabilitas penerimaan  
negara

Layanan Single Currency  
(Rupiah)

Layanan Multiple Currencies  
(termasuk Valas)

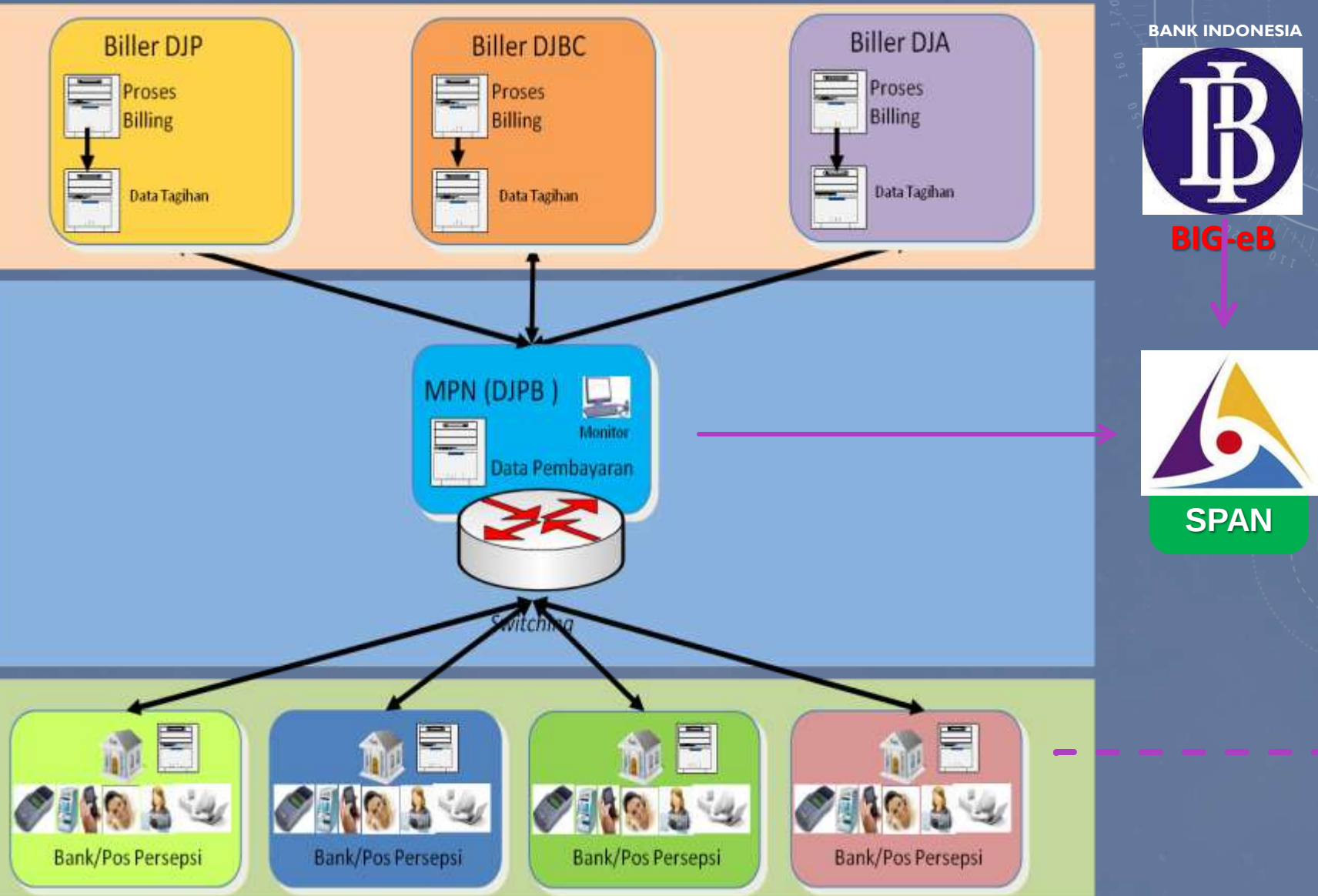
Ketersediaan Kas dalam  
berbagai jenis Valuta

Layanan Terpisah Per Unit  
Eselon I (Individual)

Data Transaksi Bersama dan  
Terkoordinasi

Kesatuan Database dan  
Informasi Penerimaan  
Negara

# KONFIGURASI SISTEM MPN-G2



# DAFTAR BANK PESERTA MPN G2

Per Agustus 2016

|                                   |                             |                                |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BANK BNI SYARIAH                  | BANGKOK BANK PUBLIC CO. LTD | BANK ACEH                      | BANK BUMI ARTA                  |
| BANK CENTRAL ASIA                 | BANK DBS INDONESIA          | BANK ANZ INDONESIA             | BANK COMMONWEALTH               |
| BANK CIMB NIAGA                   | BANK MIZUHO INDONESIA       | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | BANK ICBC INDONESIA             |
| BANK GANESHA                      | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN  | BANK BUKOPIN                   | BANK MASPION INDONESIA          |
| BANK J TRUST INDONESIA            | BANK PAN INDONESIA          | BANK DANAMON INDONESIA         | BANK OCBC NISP                  |
| BANK MANDIRI                      | BANK PERMATA                | BANK DKI                       | BANK QNB INDONESIA              |
| BANK MAYAPADA INTERNATIONAL       | BANK RESONA PERDANIA        | BANK EKONOMI RAHARJA           | BANK SHINHAN INDONESIA          |
| BANK MAYBANK INDONESIA            | BANK SULAWESI UTARA         | BANK JASA JAKARTA              | BANK SINARMAS                   |
| BANK MESTIKA DHARMA               | BANK TABUNGAN NEGARA        | BANK KEB HANA INDONESIA        | BPD JAMBI                       |
| BANK NEGARA INDONESIA             | BANK UOB INDONESIA          | BANK MEGA                      | BPD JAWA TENGAH                 |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. LTD | BPD BALI                    | BANK MUAMALAT INDONESIA        | BPD KALIMANTAN BARAT            |
| BANK RAKYAT INDONESIA             | BPD JAWA TIMUR              | BANK NUSA TENGGARA BARAT       | BPD KALIMANTAN TENGAH           |
| BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional  | BPD LAMPUNG                 | BANK OF AMERICA                | BPD MALUKU                      |
| BANK WOORI SAUDARA 1906           | BPD NUSA TENGGARA TIMUR     | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | BPD PAPUA                       |
| BPD JAWA BARAT DAN BANTEN         | BPD SUMATERA BARAT          | BANK SYARIAH MANDIRI           | BPD SULAWESI TENGAH             |
| BPD KALIMANTAN SELATAN            | BPD SUMATERA UTARA          | BPD BENGKULU                   | BPD SULAWESI TENGGARA           |
| BPD RIAU KEPRI                    | DEUTSCHE BANK AG            | BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | JP MORGAN CHASE BANK            |
| BPD SUMSEL BABEL                  | HSBC                        | BPD KALIMANTAN TIMUR           | PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk |
| CITIBANK, N.A                     | PT BANK CTBC INDONESIA      | BPD SULSELBAR                  | RABOBANK INDONESIA              |
| POS INDONESIA                     |                             | STANDARD CHARTERED BANK        |                                 |

# **KELEMAHAN CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK MIGAS DAN MINERBA MELALUI MEKANISME NON MPN (SISTEM LAMA)**

1. Sulit untuk mengidentifikasi maksud setoran karena penyetoran dilakukan dengan cara transfer sehingga tidak tercantum kode akun setoran, kode BA dan lain-lain.
2. Beberapa jenis setoran dilakukan dalam satu kali transfer sekaligus sehingga harus dilakukan identifikasi oleh pihak DJA.
3. Terjadi perbedaan tanggal pembukuan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah karena pihak perusahaan mencatat penyetoran ketika melakukan transfer ke RPL (step 1) sedangkan pemerintah mengakui adanya penerimaan negara ketika hak pemerintah pusat sudah masuk ke R-KUN (step 4).
4. Perusahaan kurang memiliki bukti setor yang sah (SSBP/SSP) karena yang dimiliki hanyalah bukti transfer antar bank atau mungkin hanya catatan transaksi di rekening koran

# **LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DJPB UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MIGAS DAN MINERBA**

1. Melakukan identifikasi permasalahan pada regulasi-regulasi dan mekanisme penyetoran penerimaan negara pada sektor migas dan minerba.
2. Berupaya melakukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyetoran penerimaan negara pada sektor migas dan minerba.
3. Melakukan penyempurnaan Modul Penerimaan Negara G2 sehingga bisa melayani seluruh penyetoran penerimaan negara pada sektor migas dan minerba khususnya yang disetor dalam bentuk Valas (USD)
4. Berupaya menyempurnakan pola rekonsiliasi penerimaan negara pada sektor migas dan minerba antara DJPB dengan pihak terkait (Biro Keuangan ESDM, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan DJP)

The background is a solid blue color with faint, light-blue technical diagrams. These include circular gauges with numerical scales (0 to 200), concentric circles, and curved arrows indicating motion or flow. The diagrams are positioned in the corners and along the right side of the frame.

TERIMA KASIH